

RENCANA KERJA

TA. 2023



Pemerintah
Kabupaten
Jombang



INSPEKTORAT KABUPATEN JOMBANG

Jln. Gatot Subroto No. 169 Jombang

KATA PENGANTAR

Dengan mengucap syukur Alhamdulillah kehadiran Allah SWT, Inspektorat Kabupaten Jombang dapat menyelesaikan penyusunan Rencana Kerja (RENJA) Tahun 2023.

Rencana Kerja (Renja) Inspektorat merupakan acuan perencanaan kegiatan Inspektorat selama satu tahun yang berpedoman pada RKPD Kabupaten Jombang Tahun 2023 serta Renstra Perubahan Inspektorat Tahun 2018-2023 (Sesuai dengan Kepemendagri 050-5889). Penyusunan Renja Inspektorat merupakan amanat dari Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, yang diatur secara rinci pada Peraturan Pemerintah Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.

Rencana Kerja (Renja) Inspektorat Tahun 2023 memuat visi, misi, tujuan, sasaran, kebijakan, program dan kegiatan pembangunan sesuai dengan tugas dan fungsi Inspektorat, berpedoman pada Renstra Perubahan Inspektorat Tahun 2018-2023 (Sesuai dengan Kepemendagri 050-5889) dan bersifat indikatif, dan selanjutnya Rencana Kerja Inspektorat menjadi landasan atau pedoman bagi penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) Inspektorat Tahun Anggaran 2023. Hal ini dilaksanakan dalam upaya mewujudkan visi dan misi yang telah ditetapkan di dalam Perubahan RPJMD Kabupaten Jombang Tahun 2018-2023.

Tak lupa kami ucapkan terimakasih kepada semua pihak yang telah berpartisipasi hingga tersusunnya Rencana Kerja Inspektorat ini. Perlu disadari bahwa masih banyak kekurangan dan kelemahan dalam penyusunan Rencana Kerja ini, oleh karena itu masukan serta saran perbaikan tetap kami harapkan dan terimakasih.



Jombang, 20 Juni 2022

INSPEKTUR KABUPATEN JOMBANG

Drs. EKA SUPRASETYO A.P., MM.

Pembina Utama Muda

NIP.19620825 198611 1 001

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR i

DAFTAR ISI ii

DAFTAR TABEL..... iii

BAB I PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang I - 1

1.2. Landasan hukum I - 2

1.3. Maksud dan tujuan..... I - 4

 1.3.1. Maksud I - 4

 1.3.2. Tujuan I - 4

1.4. Sistematika RENJA..... I - 5

BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA SKPD TAHUN LALU

2.1. Evaluasi pelaksanaan renja SKPD tahun lalu
 dan capaian renstra Inspektorat II - 6

2.2. Analisis kinerja pelayanan Inspektorat..... II - 7

2.3. Isu - isu penting penyelenggaraan tupoksi Inspektorat II - 9

2.4. Reviu terhadap rancangan awal RKPD II - 9

2.5. Penelaahan usulan program dan kegiatan masyarakat II - 14

BAB III TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGATAN

3.1. Telaahan terhadap kebijakan nasional III - 16

3.2. Tujuan dan sasaran Renja Inspektorat III - 20

 3.2.1. Tujuan III - 20

 3.2.2. Sasaran III - 20

3.3. Program dan Kegiatan III - 20

BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH ... IV - 23

BAB V PENUTUP..... IV - 26

DAFTAR TABEL

Tabel 2.2 Pencapaian Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Tabel 2.3 Reviu Rancangan Awal RKPD Tahun 2023 Inspektorat Kabupaten Jombang

Tabel 2.4 Usulan Program Dan Kegiatan Dari Pemangku Kepentingan Tahun 2023

Tabel 3.1 Misi, Tujuan dan Sasaran

Tabel 3.2 Rumusan Rencana Program dan Kegiatan perangkat daerah tahun 2022 dan
Prakiraan maju tahun 2023

Tabel 4.1 Program dan Kegiatan Tahun 2022 dan Prakiraan Maju Tahun 2023

BAB I. PENDAHULUAN

1.1. LATAR BELAKANG

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015, dimana pada pasal 151 ditegaskan bahwa Satuan Kerja Perangkat Daerah menyusun Rencana Strategis yang disebut Renstra SKPD (Satuan Kerja Perangkat Daerah) yang memuat visi, misi, tujuan, strategi, kebijakan program dan kegiatan pembangunan sesuai dengan tugas dan fungsinya, berpedoman pada RPJM Daerah dan bersifat indikatif.

Di dalam Manajemen Pemerintah terdapat 4 (empat) pilar komponen manajemen Pemerintahan yang saling terkait dan saling mendukung satu sama lain yaitu: unsur Perencanaan (*Planning*), Pengorganisasian (*Organizing*), Pelaksanaan (*actuating*) dan Pengawasan (*Controlling*) Penyelenggaraan Pemerintahan.

Inspektorat Kabupaten Jombang merupakan salah satu dari komponen pelaksana pemerintahan yang mempunyai Tugas Pokok dan Fungsi yaitu membantu Bupati dalam melakukan pembinaan dan pengawasan pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah dan tugas pembantuan oleh Perangkat Daerah, serta pembinaan dan pengawasan pelaksanaan urusan pemerintahan desa. Hal ini dilaksanakan dalam rangka mewujudkan pemerintah yang baik dan bersih (*Good Governance*)

Inspektorat Kabupaten Jombang sebagai unsur penyelenggaraan pemerintahan negara dalam rangka mewujudkan good governance, dituntut untuk mampu mempertanggungjawaban pelaksanaan tugas dan fungsinya serta kewenangan pengelolaan sumberdaya dengan didasarkan suatu perencanaan strategis. Perencanaan Strategis tersebut meliputi Rencana Strategis Organisasi

Perangkat Daerah (Renstra OPD) untuk jangka waktu lima tahun dan Rencana Kerja Organisasi Perangkat Daerah (Renja OPD). Adapun dengan terbitnya Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889, sehingga diterbitkan Rencana Strategis

Untuk melaksanakan tugas-tugas lebih lanjut Inspektorat Kabupaten Jombang perlu menyusun Rencana Kerja Tahunan sebagai Implementasi dari Rencana Kerja Tahunan (RKT) yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategis (RENSTRA) Inspektorat.

1.2. LANDASAN HUKUM

Dasar Hukum yang digunakan dalam penyusunan Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (RENJA SKPD) :

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 194, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
2. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah sebagaimana diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah kedua kalinya dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);

11. Peraturan Daerah Kabupaten Jombang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Jombang sebagaimana diubah untuk ketiga kalinya dengan Peraturan Daerah Kabupaten Jombang Nomor 12 Tahun 2020;
12. Peraturan Bupati Jombang Nomor 63 Tahun 2020 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok dan Fungsi serta Tata Kerja Inspektorat Kabupaten Jombang.

1.3. MAKSUD DAN TUJUAN

1.3.1. Maksud

Penyusunan Rencana Kerja Tahun 2023 Inspektorat Kabupaten Jombang dimaksudkan untuk :

1. Memberikan arah dan pedoman bagi seluruh aparatur Inspektorat Kabupaten Jombang dalam melaksanakan tugasnya dalam menentukan prioritas sasaran dan target capaian kinerja yang dilaksanakan didalam program dan kegiatan yang telah ditetapkan dalam kurun waktu Tahun 2023 dapat berjalan sesuai petunjuk teknis yang ditetapkan dalam pelaksanaan APBD Tahun 2023.
2. Mempermudah pengendalian, monitoring, evaluasi dan koordinasi pelaksanaan rencana kegiatan dalam Tahun 2023.
3. Memberikan pedoman dalam rangka pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Inspektorat.

1.3.2. Tujuan

Tujuan penyusunan Rencana Kerja Inspektorat Kabupaten Jombang Tahun 2023 adalah untuk :

1. Mengoptimalkan peran dan fungsi Inspektorat dalam Pengawasan Daerah.

2. Mewujudkan perencanaan pembangunan yang akuntabel, partisipatif, bermanfaat, tepat sasaran dan berkesinambungan;
3. Mewujudkan pertanggungjawaban dalam mencapai visi, misi dan tujuan pembangunan daerah;
4. Meningkatkan koordinasi dan sinkronisasi dalam perencanaan pembangunan.

1.1. SISTEMATIKA RENCANA KERJA

Rencana Kerja (RENJA) Inspektorat Tahun 2023 disusun berdasarkan sistematika sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

- 1.1. LATAR BELAKANG
- 1.2. LANDASAN HUKUM
- 1.3. MAKSUD DAN TUJUAN
- 1.4. SISTEMATIKA PENULISAN

BAB II HASIL EVALUASI RENCANA KERJA INSPEKTORAT TAHUN LALU

- 2.1. EVALUASI PELAKSANAAN RENCANA KERJA INSPEKTORAT TAHUN LALU DAN CAPAIAN RENSTRA INSPEKTORAT
- 2.2. ANALISIS KINERJA PELAYANAN INSPEKTORAT
- 2.3. ISU-ISU PENTING PENYELENGGARAAN TUGAS DAN FUNGSI INSPEKTORAT
- 2.4. REVIU TERHADAP RANCANGAN AWAL RKPD
- 2.5. PENELAAHAN USULAN PROGRAM DAN KEGIATAN MASYARAKAT.

BAB III TUJUAN DAN SASARAN INSPEKTORAT

- 3.1. TELAAHAN TERHADAP KEBIJAKAN NASIONAL
- 3.2. TUJUAN DAN SASARAN RENCANA KERJA INSPEKTORAT
- 3.3. PROGRAM DAN KEGIATAN

BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN INSPEKTORAT

BAB V PENUTUP

BAB II

EVALUASI PELAKSANAAN RENCANA KERJA INSPEKTORAT TAHUN LALU

2.1. EVALUASI PELAKSANAAN RENCANA KERJA INSPEKTORAT TAHUN LALU DAN CAPAIAN RENSTRA INSPEKTORAT

Keberhasilan yang telah dicapai dalam pelaksanaan kegiatan pada Inspektorat Kabupaten Jombang Tahun 2023 ditentukan dari hasil pelaksanaan program dan kegiatan yang sesuai dengan Rencana Kerja tahunbersangkutan dan APBD Kabupaten Jombang. Adapun program dan kegiatan yang telah dilaksanakan atau yang telah direalisasikan sesuai dengan pagu anggaran yang ditetapkan pada tahun 2022 (sebagaimana lampiran 1 tentang Rekapitulasi Evaluasi hasil Pelaksanaan Rencana Kerja Inspektorat dan Pencapaian Renstra Inspektorat)

Inspektorat Kabupaten Jombang menyadari bahwa masih ada kelemahan/kekurangan yang harus diperbaiki dan dilakukan untuk mencapai kinerja yang lebih baik. Untuk itu perlu dilakukan evaluasi terhadap apa yang telah dilaksanakan guna mengetahui penyebab kekurangan/kegagalan tersebut sebagai umpan balik dari apa yang telah dilaksanakan. Maka dilakukan evaluasi terhadap realisasi kegiatan yang hasilnya dapat dikategorikan sebagai berikut :

1. Realisasi program/kegiatan yang tidak memenuhi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan.
2. Realisasi program/kegiatan yang telah memenuhi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan.
3. Realisasi program/kegiatan melebihi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan.
4. Faktor-faktor penyebab tidak tercapainya, terpenuhinya atau melebihi target kinerja program/kegiatan.
5. Faktor-faktor penyebab terpenuhinya target kinerja program/kegiatan.
6. Implikasi yang timbul terhadap target capaian program Rencana Kerja SKPD.

7. Kebijakan/tindakan perencanaan penganggaran yang perlu diambil untuk mengatasi faktor-faktor penyebab tersebut.

2.2. ANALISIS KINERJA PELAYANAN INSPEKTORAT

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Jombang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Jombang sebagaimana diubah untuk ketiga kalinya dengan Peraturan Daerah Kabupaten Jombang Nomor 12 Tahun 2020, yang mana telah diterbitkan Peraturan Bupati Jombang Nomor 63 Tahun 2020 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok dan Fungsi serta Tata Kerja Inspektorat Kabupaten Jombang, yang menerangkan bahwa tugas pokok dan fungsi yaitu membantu Bupati dalam melakukan pembinaan dan pengawasan pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah dan tugas pembantuan oleh Perangkat Daerah, serta pembinaan dan pengawasan pelaksanaan urusan pemerintahan desa.

Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi tersebut, kinerja pelayanan yang diberikan Inspektorat adalah melakukan pengawasan dan pembinaan terhadap seluruh Organisasi Perangkat Daerah di Lingkup Kabupaten Jombang yang terkait dengan Pengelolaan Keuangan, Pengelolaan Barang milik Daerah, Pengaduan Masyarakat, Penanganan Kasus, Evaluasi Sistem Pengendalian, Reviu LKPD dan Perencanaan, serta pelaksanaan konsultasi (Sebagaimana Tabel 2.2 tentang Pencapaian Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah).

TABEL 2.2
PENCAPAIAN KINERJA PELAYANAN PERANGKAT DAERAH

NO	Indikator Sasaran	SPM/standar nasional	IKK		Target Renstra Perangkat Daerah					Keterangan
			PP No.6/2008	Kep. Inspektur Jombang	Tahun 2019	Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	
1	2	3	4		5	6	7	8	9	10
1	Maturitas SPIP	Level 3	-	-	Level 3	Level 3	Level 3	Level 3	Level 3	Data tersedia
2	Kapabilitas APIP	Level 3	-	-	-	-	Level 3	Level 3	Level 3	Data tersedia
3	Nilai SAKIP OPD	-	-	-	A	A	A	A	A	Data Tersedia

2.3. ISU-ISU PENTING PENYELENGGARAAN TUGAS DAN FUNGSI INSPEKTORAT

Terkait dengan isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi dari Inspektorat, maka beberapa isu-isu penting mengenai pengawasan telah dilaksanakan oleh Inspektorat, antara lain ;

- a) Dalam rangka melaksanakan Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah, Inspektorat Kabupaten Jombang telah proaktif dalam evaluasi Pelaksanaan SPIP pada Organisasi Perangkat Daerah dengan target pada level berkembang.
- b) Dengan terbitnya peraturan dari Peraturan Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi mengenai Reformasi Birokrasi, maka ditindak lanjuti dengan pembentukan Tim PMPRB dan Tim Asesor Utama di tingkat kabupaten, dilanjutkan pembentukan Tim Asesor di tingkat SKPD.
- c) Target Presiden bahwa lembaga APIP seluruhnya di Tahun 2019 Peningkatan Kapabilitas APIP berada pada Level 3.

2.4. REVIU TERHADAP RANCANGAN AWAL RKPD

Terkait dengan isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi dari Inspektorat, maka beberapa isu-isu penting mengenai pengawasan telah dilaksanakan oleh Inspektorat, antara lain ;

- a) Dalam rangka melaksanakan Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah, Inspektorat Kabupaten Jombang telah proaktif dalam evaluasi Pelaksanaan SPIP pada Organisasi Perangkat Daerah dengan target pada level berkembang.
- b) Dengan terbitnya peraturan dari Peraturan Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi mengenai Reformasi Birokrasi, maka ditindak lanjuti dengan pembentukan Tim PMPRB dan Tim Asesor Utama di tingkat kabupaten, dilanjutkan pembentukan Tim Asesor di tingkat SKPD.

- c) Target Presiden bahwa lembaga APIP seluruhnya di Tahun 2019 Peningkatan Kapabilitas APIP berada pada Level 3.
(sebagaimana Tabel 2.3 tentang reviu terhadap Rancangan awal RKPD tahun 2023 Inspektorat Kab. Jombang)

TABEL 2.3
REVIU RANCANGAN AWAL RKPD TAHUN 2023
INSPEKTORAT KABUPATEN JOMBANG

NO	RANCANGAN AWAL RKPD					HASIL ANALISIS KEBUTUHAN					
	PROGRAM / KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	TARGET CAPAIAN	ANGGARAN (Rp.)	PROGRAM / KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	TARGET CAPAIAN	ANGGARAN (Rp.)	Ket
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN	Jombang	Persentase Tindak Lanjut hasil Pengawasan selesai (APIP dan BPK)	93.5%	1.306.411.200	PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN	Jombang	Persentase Tindak Lanjut hasil Pengawasan selesai (APIP dan BPK)	93%	121,892,400	
	Penyelenggaraan Pengawasan Internal	Jombang	Persentase Laporan Hasil Pemeriksaan Penyelenggaraan pengawasan yang telah ditindaklanjuti	93.5%	1.117.833.200	Penyelenggaraan Pengawasan Internal	Jombang	Persentase Laporan Hasil Pemeriksaan Penyelenggaraan pengawasan yang telah ditindaklanjuti	93%	102,556,900	
	Penyelenggaraan Pengawasan dengan Tujuan Tertentu	Jombang	Persentase Laporan Hasil Penyelenggaraan pengawasan dengan tujuan tertentu yang telah ditindaklanjuti	93.5%	188.578.000	Penyelenggaraan Pengawasan dengan Tujuan Tertentu	Jombang	Persentase Laporan Hasil Penyelenggaraan pengawasan dengan tujuan tertentu yang telah ditindaklanjuti	93%	19,335,500	
2	PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI	Jombang	Persentase kebijakan teknis pengawasan yang diterbitkan	100%	570.275.000	PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI	Jombang	Persentase kebijakan teknis pengawasan yang diterbitkan	100%	141,206,000	
			Persentase tindak lanjut selesai atas rekomendasi asistensi dan pendampingan dalam penyelenggaraan pembinaan dan pengawasan internal	85%				Persentase tindak lanjut selesai atas rekomendasi asistensi dan pendampingan dalam penyelenggaraan pembinaan dan pengawasan internal	80%		

RANCANGAN AWAL RKPd						HASIL ANALISIS KEBUTUHAN					
NO	PROGRAM / KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	TARGET CAPAIAN	ANGGARAN (Rp.)	PROGRAM / KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	TARGET CAPAIAN	ANGGARAN (Rp.)	Ket
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan dan Fasilitasi Pengawasan	Jombang	Jumlah draft kebijakan teknis pengawasan yang dirumuskan	7 Draft	28.200.000	Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan dan Fasilitasi Pengawasan	Jombang	Jumlah draft kebijakan teknis pengawasan yang dirumuskan	2 Draft	8.000.000	
	Pendampingan dan Asistensi	Jombang	Persentase laporan asistensi dan pendampingan dalam penyelenggaraan pembinaan dan pengawasan internal yang telah ditindaklanjuti	93.5%	542.075.000	Pendampingan dan Asistensi	Jombang	Persentase laporan asistensi dan pendampingan dalam penyelenggaraan pembinaan dan pengawasan internal yang telah ditindaklanjuti	80%	133,206,000	
3	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Jombang	Persentase rata-rata capaian kinerja aparatur	100%	17.342.833.400	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Jombang	Persentase rata-rata capaian kinerja aparatur	100%	11,518,292,618	
	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jombang	Persentase dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja PD yang tersusun sesuai aturan	100%	42.750.500	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jombang	Persentase dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja PD yang tersusun sesuai aturan	100%	6,000,000	
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jombang	Persentase Pencairan gaji dan tunjangan ASN tepat waktu	100%	15.005.000.000	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jombang	Persentase Pencairan gaji dan tunjangan ASN tepat waktu	100%	10,370,768,088	
	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Jombang	Persentase pelaporan aset yang tersusun sesuai aturan	100%	700.000	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Jombang	Persentase pelaporan aset yang tersusun sesuai aturan	100%	700.000	
	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jombang	Persentase pemenuhan administrasi kepegawaian Inspektorat	100%	444.000.000	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jombang	Persentase pemenuhan administrasi kepegawaian	100%	108.522.780	

RANCANGAN AWAL RKPD						HASIL ANALISIS KEBUTUHAN					
NO	PROGRAM / KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	TARGET CAPAIAN	ANGGARAN (Rp.)	PROGRAM / KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	TARGET CAPAIAN	ANGGARAN (Rp.)	Ket
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
								Inspektorat			
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jombang	Persentase pemenuhan pelayanan administrasi perkantoran	100%	589.022.900	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jombang	Persentase pemenuhan pelayanan administrasi perkantoran	100%	186,672,050	
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jombang	Persentase pemenuhan penunjang urusan pemerintah daerah	100%	339.075.000	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jombang	Persentase pemenuhan penunjang urusan pemerintah daerah	100%	436,321,000	
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jombang	Persentase Barang Milik Daerah dalam kondisi baik	100%	719.085.000	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jombang	Persentase Barang Milik Daerah dalam kondisi baik	100%	409,308,700	
	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jombang	Persentase realisasi pengadaan sarana dan prasarana aparatur	100%	200.000.000	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jombang	Persentase realisasi pengadaan sarana dan prasarana aparatur	0%	0	
	TOTAL				19.219.519.600		TOTAL			11,781,391,018	

INSPEKTUR KABUPATEN JOMBANG



Drs. EKA SUPRASETYO A.P., MM.

Pembina Utama Muda

NIP.19620825 198611 1 001

2.5. PENELAAHAN USULAN PROGRAM DAN KEGIATAN MASYARAKAT

Dari rancangan awal yang telah disusun pada Inspektorat Kabupaten Jombang telah disesuaikan dengan perencanaan kinerja Inspektorat. Perencanaan Kinerja merupakan proses penjabaran dari sasaran dan program yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategis Inspektorat Kabupaten Jombang, yang akan dilaksanakan melalui berbagai kegiatan tahunan. Dalam Dokumen Rencana Kinerja memuat informasi tentang Indikator Tujuan dan indikator kinerja sasaran yang ingin dicapai, dan rencana capaiannya yang merupakan representasi tugas pokok dan fungsi Inspektorat Kabupaten Jombang. Indikator Tujuan dan Indikator Sasaran dijabarkan melalui program kegiatan (sebagaimana Tabel 2.4 Usulan Program dan Kegiatan Tahun 2023)

Rencana program kegiatan untuk mendukung arah kebijakan yang telah ditetapkan Inspektorat Kabupaten Jombang. Program dan Kegiatan yang dilaksanakan oleh Inspektorat Kabupaten Jombang Tahun 2023 telah sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah.

Tabel 2.4

Usulan Program Dan Kegiatan Dari Pemangku Kepentingan Tahun 2023

NO	PROGRAM / KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	TARGET CAPAIAN	ANGGARAN (Rp.)
1	2	3	4	5	6
1	PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN	Jombang	Persentase Tindak Lanjut hasil Pengawasan selesai (APIP dan BPK)	93.5%	1.306.411.200
	Penyelenggaraan Pengawasan Internal	Jombang	Persentase Laporan Hasil Pemeriksaan Penyelenggaraan pengawasan yang telah ditindaklanjuti	93.5%	1.117.833.200
	Penyelenggaraan Pengawasan dengan Tujuan Tertentu	Jombang	Persentase Laporan Hasil Penyelenggaraan pengawasan dengan tujuan tertentu yang telah ditindaklanjuti	93.5%	188.578.000
2	PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI	Jombang	Persentase kebijakan teknis pengawasan yang diterbitkan	100%	570.275.000
			Persentase tindak lanjut selesai atas rekomendasi	80%	

NO	PROGRAM / KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	TARGET CAPAIAN	ANGGARAN (Rp.)
1	2	3	4	5	6
			asistensi dan pendampingan dalam penyelenggaraan pembinaan dan pengawasan internal		
	Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan dan Fasilitasi Pengawasan	Jombang	Jumlah draft kebijakan teknis pengawasan yang dirumuskan	7 Draft	28.200.000
	Pendampingan dan Asistensi	Jombang	Persentase laporan asistensi dan pendampingan dalam penyelenggaraan pembinaan dan pengawasan internal yang telah ditindaklanjuti	93.5%	542.075.000
3	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Jombang	Persentase rata-rata capaian kinerja aparatur	100%	17.342.833.400
	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jombang	Persentase dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja PD yang tersusun sesuai aturan	100%	42.750.500
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jombang	Persentase Pencairan gaji dan tunjangan ASN tepat waktu	100%	15.005.000.000
	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Jombang	Persentase pelaporan aset yang tersusun sesuai aturan	100%	700.000
	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jombang	Persentase pemenuhan administrasi kepegawaian Inspektorat	100%	637.200.000
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jombang	Persentase pemenuhan pelayanan administrasi perkantoran	100%	589.022.900
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jombang	Persentase pemenuhan penunjang urusan pemerintah daerah	100%	339.075.000
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jombang	Persentase Barang Milik Daerah dalam kondisi baik	100%	719.085.000
	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jombang	Persentase realisasi pengadaan sarana dan prasarana aparatur	100%	200.000.000
TOTAL					19.219.519.600

BAB. III

TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, DAN KEGIATAN

3.1. TELAAHAN TERHADAP KEBIJAKAN NASIONAL

TELAAHAN TERHADAP KEBIJAKAN NASIONAL

Indonesia memiliki modal dan potensi yang sangat besar, baik sumber daya alam, letak geografis yang strategis, struktur demografi penduduk yang ideal, keragaman budaya dan sumber daya manusia yang memiliki potensi dan kreativitas yang tidak terbatas. Hal tersebut merupakan dasar untuk mewujudkan sasaran dan target pembangunan nasional yang tercantum didalam visi dan misi RPJMN Tahun 2015-2019, yaitu ***“TERWUJUDNYA INDONESIA YANG BERDAULAT, MANDIRI, DAN BERKEPRIBADIAN BERLANDASKAN GOTONG ROYONG”***. Dalam mewujudkan visi dan misi tersebut ditetapkan sembilan agenda utama pembangunan nasional yaitu :

1. Menghadirkan kembali Negara untuk melindungi segenap bangsa dan memberikan rasa aman kepada seluruh warga negara
2. Membuat Pemerintah selalu hadir dengan membangun tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, demokratis dan terpercaya.
3. Membangun Indonesia dari pinggiran dengan memperkuat daerah-daerah dan desa dalam kerangka negara kesatuan.
4. Memperkuat kehadiran negara dalam melakukan reformasi sistem dan penegakan hukum yang bebas korupsi, bermartabat, dan terpercaya.
5. Meningkatkan kualitas hidup manusia Indonesia.
6. Meningkatkan produktivitas rakyat dan daya saing di pasar Internasional sehingga bangsa Indonesia bisa maju dan bangkit bersama bangsa bangsa Asia lainnya.
7. Mewujudkan kemandirian ekonomi dengan menggerakkan sektor sektor strategis ekonomi domestik
8. Melakukan revolusi karakter bangsa

9. Memperteguh kebhinekaan dan memperkuat restorasi sosial Indonesia.

Berdasarkan visi dan misi serta agenda pembangunan nasional tersebut untuk menunjukkan prioritas dalam jalan perubahan menuju Indonesia yang berdaulat secara politik, mandiri, dalam bidang ekonomi, dan berkepribadian dalam kebudayaan, dirumuskan sembilan agenda prioritas dalam pemerintahan ke depan, Kesembilan agenda prioritas itu disebut **NAWA CITA**

Berdasarkan arah, strategi dan kebijakan serta 9 agenda prioritas pembangunan nasional, maka kebijakan – kebijakan Pemerintah Daerah Kabupaten Jombang yang di arahkan pada upaya pencapaian sasaran dan tujuan yang hendak di capai dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah RPJMD 2018–2023 merupakan dokumen perencanaan strategis pembangunan daerah dengan periode lima tahun yang berisi penjabaran dari visi, misi, dan program Bupati Jombang terpilih. RPJMD dimaksud merupakan penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Jombang Tahun 2005-2025. RPJMD Kabupaten Jombang Tahun 2018-2023 merupakan pedoman seluruh Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) di lingkup Pemerintah Kabupaten Jombang dalam menyusun Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah(Renstra-SKPD) Tahun 2018-2023, dengan Visi ***“Bersama Mewujudkan Jombang Berkarakter dan Berdaya Saing”*** dengan Misi:

1. Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih dan Profesional.
2. Mewujudkan Masyarakat Jombang yang Berkualitas, Religius dan Berbudaya
3. Meningkatkan Daya Saing Perekonomian Daerah Berbasis Kerkyatan, Potensi Unggulan Lokal dan Industri.

Tema Pembangunan Daerah Tahun 2023 sesuai dengan raperda tersebut, yaitu **“Akselerasi Pertumbuhan Ekonomi Yang Inklusif Dan Berkelanjutan Melalui Peningkatan Kualitas Dan Daya Saing Sektor Unggulan”**.

Prioritas Pembangunan Kabupaten Jombang Tahun 2023 adalah:

1. Mewujudkan pemerintahan yang professional berbasis ASN yang professional dan digitalisasi proses layanan.

Indikasi kegiatan yang menjadi prioritas yakni :

- Pembangunan Mall Pelayanan Publik
- Digitalisasi Desa/Smart Village untuk pelayanan Publik
- Pengembangan Inovasi Desa
- Pengembangan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)
- Peningkatan Profesionalisme ASN

2. Peningkatan kualitas dan kuantitas penyediaan infrastruktur dasar yang memberikan jaminan perluasan dan pemerataan akses untuk masyarakat

Indikasi Kegiatan yang menjadi prioritas yakni :

- Pembangunan Gedung Kesenian Jombang
- Pemberian kain seragam sekolah dan buku-buku untuk SD/MI, SMP/MTS baik negeri maupun swasta.
- Fasilitas Pendidikan untuk Anak berkebutuhan Khusus
- Fasilitas Alat Bantu Bagi Disabilitas
- Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Sekolah
- Kurikulum sekolah berbasis digital
- Penjaminan Mutu Pendidikan dan Pendidik
- Pendidikan Karakter (Mulok)
- Insentif bagi Guru Ngaji, Hafidz dan Hafidzah
- Penurunan Stunting (Jombang Berkadang)
- Penyediaan Pelayanan Ibu dan Anak (Jombang Berkadang)
- Pencegahan dan Penanganan kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak
- Pencapaian sanitasi 100 % dan 0% Kawasan Kumuh (Jombang Berkadang).
- Penanganan Drainase, Sampah dan Limbah dan Air Bersih

3. Peningkatan daya Tarik investasi melalui penyediaan infrastruktur ekonomi dan kemudahan layanan perizinan

Indikasi Kegiatan yang menjadi prioritas yakni :

- Pengembangan kawasan industri;
- Upaya Peningkatan PAD (Penyertaan Modal kepada BUMD);
- Pengembangan Potensi Ekonomi Daerah (Penyertaan Modal BumDes melalui Berkadang);
- Pelebaran & Pembangunan Jalan menuju pusat-pusat sentra ekonomi;
- Pembangunan dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi;
- Fasilitasi sarana usaha bagi kepala rumah tangga miskin perempuan melalui Program Jombang Berkadang.

4. Hilirisasi dan peningkatan daya saing ekonomi daerah melalui Penguatan produktivitas dan kreasi produk unggulan

Indikasi Kegiatan yang menjadi prioritas yakni :

- Penyusunan Regulasi untuk pengembangan hasil-hasil Produk Unggulan Daerah;
- Kerjasama Pemasaran Produk Unggulan baik secara offline maupun online;
- Revitalisasi Pasar;
- Pengendalian OPT Pertanian;
- Jaminan Ketersediaan Pupuk;
- Mendorong terwujudnya kualitas dan kemandirian strategis bagi pondok pesantren;
- Peningkatan produksi/produktivitas pertanian/peternakan dan perikanan serta pengembangan potensi-potensi industri rumahan.

5. Membangun Lingkungan Hidup yang berkelanjutan dan Ketahanan Bencana

- Normalisasi sungai (Program Resik Kaliku)
- Lanjutan penanganan dampak Covid-19
- 1. Jombang Peduli Sampah, melalui Penyediaan TPS-3R di beberapa desa dan pondok pesantren (diakomodasi melalui program prioritas kecamatan)

3.2. TUJUAN DAN SASARAN RENCANA KERJA INSPEKTORAT

Tujuan merupakan penjabaran atau implementasi dari pernyataan Misi Inspektorat Kabupaten Jombang yaitu sesuatu (apa) yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 5 (lima) tahunan. Sedangkan sasaran merupakan penjabaran dari tujuan Inspektorat Kabupaten Jombang, yaitu hasil yang akan dicapai secara nyata dalam rumusan yang lebih spesifik, terinci, dapat diukur dan dapat dicapai, serta dalam kurun waktu yang lebih pendek dari tujuan. Adapun tujuan dan sasaran yang akan dicapai oleh Inspektorat Kabupaten Jombang berdasarkan rumusan misi sebagaimana tertuang di atas adalah sebagai berikut :

Tabel 3.1
MISI, TUJUAN DAN SASARAN

TUJUAN	INDIKATOR TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR KINERJA SASARAN
Misi 1: Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih dan Profesional			
Pengawasan yang profesional dan akuntabel	Indeks Reformasi Birokrasi	Meningkatnya Hasil Pengawasan yang berkualitas dan akuntabel	1. Maturitas SPIP 2. Kapabilitas APIP
		Meningkatnya Akuntabilitas dan Kinerja Perangkat Daerah	3. Nilai SAKIP OPD

3.3. PROGRAM DAN KEGIATAN

Inspektorat Kabupaten Jombang dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi pengawasan mempunyai beberapa program dan kegiatan sebagaimana termuat dalam RPJMD diantaranya (sesuai dengan Tabel 3.2 Rumusan Rencana Program dan Kegiatan perangkat daerah tahun 2023 dan prakiraan maju tahun 2024)

Tabel 3.2

Rumusan Rencana Program dan Kegiatan perangkat daerah tahun 2023 dan prakiraan maju tahun 2024

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun (2023)				Catatan	PRAKIRAAN MAJU TAHUN 2024	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	PROGRAM PENYELENGGA RAAN PENGAWASAN	Jombang	Persentase Tindak Lanjut hasil Pengawasan selesai (APIP dan BPK)	93%	121,892,400	APBD	-	94%	1.469.855.675
	Penyelenggaraan Pengawasan Internal	Jombang	Persentase Laporan Hasil Pemeriksaan Penyelenggaraan pengawasan yang telah ditindaklanjuti	93%	102,556,900	APBD	-	94%	1.269.855.675
	Penyelenggaraan Pengawasan dengan Tujuan Tertentu	Jombang	Persentase Laporan Hasil Penyelenggaraan pengawasan dengan tujuan tertentu yang telah ditindaklanjuti	93%	19,335,500	APBD	-	94%	200.000.000
2	PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI	Persentase kebijakan teknis pengawasan yang diterbitkan	Jombang	100%	141,206,000	APBD	-	100%	579.000.000
		Persentase tindak lanjut selesai atas rekomendasi asistensi dan pendampingan dalam penyelenggaraan pembinaan dan pengawasan internal		80%				85%	
	Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan dan Fasilitasi Pengawasan	Jombang	Jumlah draft kebijakan teknis pengawasan yang dirumuskan	2 Draft	1.600.000	APBD	-	7 Draft	30.000.000
	Pendampingan dan Asistensi	Jombang	Persentase laporan asistensi dan pendampingan dalam penyelenggaraan	80%	133,206,000	APBD	-	93,5%	549.000.000

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan	Rencana Tahun (2022)				Catatan	PRAKIRAAN MAJU TAHUN 2023	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			pembinaan dan pengawasan internal yang telah ditindaklanjuti						
3	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Jombang	Persentase rata-rata capaian kinerja aparatur	100%	11,518,292,618	APBD	-	100%	17.361.850.500
	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jombang	Persentase dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja PD yang tersusun sesuai aturan	100%	6,000,000	APBD	-	100%	42.750.500
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jombang	Persentase Pencairan gaji dan tunjangan ASN tepat waktu	100%	10,370,768,088	APBD	-	100%	15.008.400.000
	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Jombang	Persentase pelaporan aset yang tersusun sesuai aturan	100%	700.000	APBD	-	100%	700.000
	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jombang	Persentase pemenuhan administrasi kepegawaian Inspektorat	100%	108.522.780	APBD	-	100%	600.000.000
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jombang	Persentase pemenuhan pelayanan administrasi perkantoran	100%	186,672,050	APBD	-	100%	605.000.000
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jombang	Persentase pemenuhan penunjang urusan pemerintah daerah	100%	436,321,000	0	-	100%	385.000.000
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jombang	Persentase Barang Milik Daerah dalam kondisi baik	100%	409,308,700	APBD	-	100%	720.000.000
TOTAL					11,781,391,018				19.410.706.175

BAB. IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Renja merupakan acuan setiap Perangkat Daerah (PD) dalam mengoperasionalkan program dan kegiatan sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya dalam mencapai Visi dan Misi Kepala Daerah. Dengan rencana kerja yang terukur dan didukung oleh pendanaan, maka Renja PD menjadi suatu instrument dan indikator yang dapat digunakan dalam upaya mewujudkan pembangunan daerah agar lebih terarah.

Rencana kerja dan pendanaan memuat Program, Kegiatan, Indikator, Lokasi, Kebutuhan dana tahun berjalan dan Prakiraan maju sebagaimana dapat dilihat pada Tabel 4.1 sebagai berikut:

Tabel 4.1
Program dan Kegiatan Tahun 2023 dan Prakiraan Maju Tahun 2024

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun (2023)				Catatan	PRAKIRAAN MAJU TAHUN 2024	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN	Jombang	Persentase Tindak Lanjut hasil Pengawasan selesai (APIP dan BPK)	93%	121,892,400	APBD	-	94%	1.469.855.675
	Penyelenggaraan Pengawasan Internal	Jombang	Persentase Laporan Hasil Pemeriksaan Penyelenggaraan pengawasan yang telah ditindaklanjuti	93%	102,556,900	APBD	-	94%	1.269.855.675
	Penyelenggaraan Pengawasan dengan Tujuan Tertentu	Jombang	Persentase Laporan Hasil Penyelenggaraan pengawasan dengan tujuan tertentu yang telah ditindaklanjuti	93%	19,335,500	APBD	-	94%	200.000.000

2	PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI	Persentase kebijakan teknis pengawasan yang diterbitkan	Jombang	100%	141,206,000	APBD	-	100%	579.000.000
		Persentase tindak lanjut selesai atas rekomendasi asistensi dan pendampingan dalam penyelenggaraan pembinaan dan pengawasan internal		80%				85%	
	Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan dan Fasilitasi Pengawasan	Jombang	Jumlah draft kebijakan teknis pengawasan yang dirumuskan	2 Draft	1.600.000	APBD	-	7 Draft	30.000.000
	Pendampingan dan Asistensi	Jombang	Persentase laporan asistensi dan pendampingan dalam penyelenggaraan	80%	133,206,000	APBD	-	93,5%	549.000.000
3	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Jombang	Persentase rata-rata capaian kinerja aparatur	100%	10.844.259.629	APBD	-	100%	17.361.850.500
	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jombang	Persentase dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja PD yang tersusun sesuai aturan	100%	12.390.000	APBD	-	100%	42.750.500
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jombang	Persentase Pencairan gaji dan tunjangan ASN tepat waktu	100%	9.738.698.049	APBD	-	100%	15.008.400.000
	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Jombang	Persentase pelaporan aset yang tersusun sesuai aturan	100%	700.000	APBD	-	100%	700.000
	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jombang	Persentase pemenuhan administrasi kepegawaian Inspektorat	100%	108.522.780	APBD	-	100%	600.000.000

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan	Rencana Tahun (2022)				Catatan	PRAKIRAAN MAJU TAHUN 2023	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jombang	Persentase pemenuhan pelayanan administrasi perkantoran	100%	142.627.800	APBD	-	100%	605.000.000
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jombang	Persentase pemenuhan penunjang urusan pemerintah daerah	100%	417.111.000	0	-	100%	385.000.000
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jombang	Persentase Barang Milik Daerah dalam kondisi baik	100%	424.210.000	APBD	-	100%	720.000.000
TOTAL					12.494.305.699				19.410.706.175

BAB. V PENUTUP

Rencana Kerja Inspektorat Kabupaten Jombang yang didalamnya mencakup Visi, Misi, Tujuan, Sasaran, Kebijakan, Program dan Kegiatan yang disusun ini agar dapat menjadi pedoman atau acuan dalam mencapai tujuan pembangunan di bidang pengawasan.

Adanya Rencana Kerja ini diharapkan agar Inspektorat Kabupaten Jombang serta seluruh aparatnya dapat melaksanakan tugas secara terarah, bertahap dan berkesinambungan dengan tetap mengadakan koordinasi dengan instansi terkait dan untuk mengantisipasi tuntutan masyarakat akan pelayanan di bidang pengawasan.

Dengan Rencana Kerja Tahunan ini diharapkan visi dan misi Inspektorat Kabupaten Jombang yang diuraikan dalam bentuk Program dan Kegiatan di Bidang Pengawasan dapat dipertanggung jawabkan sehingga dapat memberikan gambaran yang cukup jelas sebagai salah satu cara untuk mencapai tujuan terhadap Tugas Pokok pelaksanaan dan Fungsi Organisasi Inspektorat Kabupaten Jombang dan bisa memberikan manfaat yang maksimal untuk meningkatkan Efektifitas Pengawasan dalam rangka ***Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih dan Profesional.***

Akhir kata, semoga Rencana Kerja Inspektorat Kabupaten Jombang ini dapat dilaksanakan dengan baik disertai kerja keras dan dedikasi yang tinggi dari segenap aparatur di Inspektorat Kabupaten Jombang sesuai dengan tahapan-tahapan yang telah ditetapkan secara konsisten.

Demikian Rencana Kerja Inspektorat Kabupaten Jombang Tahun 2021 disusun sebagai pedoman bagi pelaksanaan Program dan Kegiatan di Inspektorat.

Jombang, 20 Juni 2023

**INSPEKTUR KABUPATEN JOMBANG**
Drs. EKA SUPRASETYO A.P., MM.
Pembina Utama Muda
NIP.19620825 198611 1 001